

Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

Versiandika Yudha Pratama¹, Syamsuddin², Farah Difa³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: ¹versiandika.yudha.pratama@iainpekalongan.ac.id, ²syamsuddin@iainpekalongan.ac.id, ³farahdifa4@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the performance of the Pekalongan Regency Government in period 2017-2019 with value for money approach in economics, efficiency and effectiveness ratio. Based on the existing characteristics, this research included in descriptive quantitative research. The data analysis technique in this study uses the concept of value for money, namely assessing performance in terms of economics, efficiency, and effectiveness ratio based on local government financial performance each period. The results of the study stated that the performance of the Pekalongan Regency Government during the 2017-2019 period was categorized as economical because it produced a ratio of less than 100%. In terms of efficiency, the performance of the Pekalongan Regency Government for the 2017 is efficient, meanwhile in the 2018 and 2019 periods the performance has not been efficient because the ratio is above 100%. In terms of effectiveness, the performance of the Pekalongan Regency Government during the 2017-2019 period tends to be not optimal but has been quite effective with an annual ratio that is above the ratio of 90%.

Keywords: Performance, Value For Money, Economics, Efficiency, Effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada periode tahun 2017-2019 ditinjau menggunakan pendekatan value for money dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Melihat karakteristik yang ada, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif deskriptif, dimana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep value for money yaitu menilai kinerja dari sisi rasio ekonomis, efisiensi, dan efektifitas berdasarkan kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periodenya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-2019 dikategorikan ekonomis karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Dari sisi efisiensi, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2017 dikatakan cukup efisien, sementara itu pada periode 2018 dan 2019 kinerja belum efisien karena rasionya di atas 100%. Dari sisi efektivitas, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-2019 cenderung belum maksimal tetapi sudah cukup efektif dengan angka rasio setiap tahunnya yang berada di atas angka rasio sebesar 90%.

Kata Kunci: Kinerja, Value For Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia meningkat pesat seiring adanya kebijakan penerapan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan kata lain, masing-masing daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia diberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya untuk kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah tersebut. Semakin

tinggi realisasi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk semakin cerdas dan berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik (Sari, 2014).

Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya sebatas kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Lembaga sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009).

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis, adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas, adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *value for money* dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik (Mulyadi, 2007). Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung jawab (akuntabilitas) yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penelitian mengenai analisis pengukuran kinerja instansi sektor publik menggunakan basis konsep *value for money* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menghasilkan temuan yang bervariasi di setiap instansi. Penelitian Indriyani (2018) menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe dapat menerapkan *value for money* sebagai konsep pengukuran kinerjanya, walaupun dilihat dari sisi efektifitasnya pada tahun 2014-2016 dinilai belum cukup efektif karena masih di bawah 100%. Penelitian Arief (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja daerah dan Pembiayaan Daerah cukup baik ditinjau dari perspektif ekonomis, efisiensi dan efektifitasnya. Purwiyanti (2017) menyatakan bahwa Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya dengan efektif, ekonomis dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang mengurus segala urusan dan bidang pelayanan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Beberapa urusan dan bidang kegiatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan diantaranya urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan pemerintahan/penunjang. Urusan wajib pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta bidang sosial. Urusan wajib non pelayanan dasar diantaranya adalah bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Urusan pilihan terdiri dari bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian serta transmigrasi. Sementara itu, urusan pemerintahan/penunjang meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta pemerintahan umum. Dengan berbagai urusan dan bidang kegiatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga dituntut menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam hal penggunaan dana keuangan.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, inilah yang menjadi dasar perlunya untuk diadakannya penelitian mengenai Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017-2019 ditinjau dengan pendekatan *Value For Money* dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ini merupakan gambaran atau lukisan secara faktual mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan prinsip *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017-2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2019 dan website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *value for money* yaitu suatu analisis yang menilai kinerja suatu entitas dari suatu segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Berikut dijelaskan teknik analisis data pada masing-masing elemen sesuai dengan penelitian Khikmah (2014):

a) Pengukuran Ekonomis

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

b) Pengukuran Efisiensi

Rumus rasio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Jika > 100% berarti tidak efisien

c) Pengukuran Efektivitas

Rasio efektivitas dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti tidak efektif
 Jika = 100% berarti efektif berimbang
 Jika > 100% berarti efektif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan diukur berdasarkan pada data keuangan yang meliputi APBD dan RAPBD periode tahun 2017-2019. Berikut disajikan data anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan belanja daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2017-2019 yang berhasil dihimpun dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pekalongan periode 2017-2019.

Tabel 1
 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
 Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pendapatan	2.076.035.321.293,00	2.176.551.072.207,00	2.288.761.562.831,00
PAD	300.887.832.132,00	369.095.235.409,00	408.032.305.251,00
Pajak Daerah	43.097.055.123,00	58.084.242.000,00	75.262.615.223,00
Retribusi Daerah	9.263.217.350,00	14.189.768.150,00	14.495.004.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.503.847.745,00	7.354.575.846,00	17.540.252.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	241.023.711.914,00	289.466.649.413,00	300.734.433.528,00
Pendapatan Transfer	1.754.379.677.161,00	1.729.402.214.561,00	1.792.656.386.146,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.295.916.881.000,00	1.313.674.853.000,00	1.359.235.481.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	310.384.390.000,00	235.889.555.400,00	294.935.985.000,00
Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	92.388.416.161,00	101.038.416.161,00	110.244.920.146,00
Bantuan Keuangan	55.689.990.000,00	78.799.390.000,00	28.240.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.767.812.000,00	78.053.622.237,00	88.072.871.434,00
Belanja	2.275.684.213.022,00	2.406.643.199.984,00	2.449.343.147.800,00
Belanja Operasi	1.449.611.585.386,00	1.499.759.625.335,00	1.577.271.769.903,00
Belanja Modal	438.968.966.319,00	560.145.115.624,00	472.692.648.017,00
Belanja Tak Terduga	11.590.458.978,00	3.000.000.000,00	6.642.218.430,00
Transfer	375.513.202.339,00	343.738.459.025,00	392.736.511.450,00
Pembiayaan	199.648.891.729,00	230.092.127.777,00	160.581.584.969,00
Penerimaan Pembiayaan	204.080.052.999,00	230.092.127.777,00	170.581.584.969,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.431.161.270,00	0,00	10.000.000.000,00

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan (2017-2019)

Tabel 2
 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
 Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pendapatan	2.067.907.851.793,00	2.101.449.302.496,00	2.182.770.952.455,00
PAD	305.394.299.060,00	311.288.143.681,00	341.344.415.574,00
Pajak Daerah	47.296.812.764,00	65.416.345.222,00	78.217.364.950,00
Retribusi Daerah	8.583.644.639,00	10.166.247.196,00	12.809.087.183,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.506.941.886,00	7.345.575.846,00	17.331.867.264,00
Lain-lain PAD yang Sah	242.006.899.771,00	228.350.975.417,00	232.986.096.177,00
Pendapatan Transfer	1.740.112.746.919,00	1.709.449.892.326,00	1.749.813.235.371,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana	1.282.878.563.801,00	1.288.217.218.448,00	1.321.954447.227,00

Perimbangan			
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	310.399.174.568,00	235.517.071.400,00	294.328.777.800,00
Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	98.757.216.000,00	110.590.263.438,00	110.523.017.246,00
Bantuan Keuangan	48.077.792.550,00	75.125.339.000,00	23.006.993.098,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.400.805.814,00	80.711.266.459,00	91.613.301.510,00
Belanja	2.037.600.968.643,00	2.160.744.430.323,00	2.183.534.790.005,00
Belanja Operasi	1.318.662.172.060,00	1.385.548.638.839,00	1.441.899.258.407,00
Belanja Modal	336.815.993.533,00	431.412.970.525,00	345.165.297.652,00
Belanja Tak Terduga	8.359.950.228,00	2.077.863.000,00	4.535.641.419,00
Transfer	373.762.852.822,00	341.704.957.959,00	391.934.592.527,00
Pembiayaan	199.775.694.627,00	229.856.828.594,00	160.620.432.491,00
Penerimaan	204.206.855.897,00	229.856.828.594,00	170.620.432.491,00
Pembiayaan			
Pengeluaran	4.431.161.270,00	0,00	10.000.000.000,00
Pembiayaan			

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan (2017-2019)

Rasio Ekonomis

Ekonomis merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomis (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa presentase tingkat pencapaian. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya (Andriani, 2012). Rasio ekonomis atau perubahan biaya dikatakan baik apabila besarnya tingkat pembelanjaan yang direalisasikan lebih rendah dari yang sudah dianggarkan.

Tabel 3.
 Rasio Ekonomis Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Anggaran Pengeluaran (Rp)	Rasio Ekonomis
2017	2.037.600.968.643,00	2.275.684.213.022,00	89,54%
2018	2.160.744.430.323,00	2.406.643.199.984,00	89,78%
2019	2.183.534.790.005,00	2.449.343.147.800,00	89,15%

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan (2017-2019)

Berdasarkan tabel 3 di atas, pada periode 2017-2019, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dikatakan ekonomis karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Tahun 2017, rasio ekonomis Kabupaten Pekalongan sebesar 89,54%, Tahun 2018 sebesar 89,78% dan di tahun 2019 sebesar 89,15%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan cenderung ekonomis dari tahun 2017-2019. Hal ini dikarenakan realisasi pengeluaran dari tahun 2017-2019 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pengeluarannya sehingga dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada periode tersebut cukup ekonomis. Akan tetapi, dilihat dari trend pada periode tersebut, rasio ekonomis dari tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya walaupun tidak terlalu signifikan. Jika ditelisik, hal ini dikarenakan adanya belanja operasi yang meningkat pada tahun 2019, yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 986.238.926.622,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 406.983.971.785,00, belanja hibah sebesar Rp. 31.513.710.000,00 serta belanja bantuan sosial yang mencapai Rp. 17.162.650.000,00.

Rasio Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya

dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Pengukuran organisasi sektor publik dikatakan efisien apabila menghasilkan output sebesar-besarnya dan menggunakan input serendah-rendahnya.

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau Semakin kecil rasio efesiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Andriani, 2012).

Tabel 4.
 Rasio Efisiensi Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi
2017	2.037.600.968.643,75	2.067.907.851.793,77	98,53%
2018	2.160.744.430.323,00	2.101.449.302.496,83	102,82%
2019	2.183.534.790.005,00	2.182.770.952.455,51	100,03%

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan (2017-2019)

Dilihat dari table 4 di atas, pencapaian efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan bisa dikategorikan kurang efisien untuk periode 2017-2019. Hal ini terlihat pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan rasio yang lebih dari 100%, yaitu pada tahun 2018 sebesar 102,82% dan pada tahun 2019 sebesar 100,03%, yang artinya bahwa kinerja Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 dan 2019 tidak efisien. Adanya ketidakefisienan kinerja tersebut dikarenakan realisasi pendapatan pada tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Pekalongan lebih kecil dibandingkan Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun demikian, melihat trend rasio efisiensi dari tahun 2018 menuju 2019 terjadi kenaikan yang cukup baik. Tentunya hal tersebut menandakan adanya perbaikan kinerja Kabupaten Pekalongan terkait efisiensi keuangan, yang artinya bahwa pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu menggunakan sumber daya yang ada secara minimal untuk memperoleh dan mencapai target yang optimal.

Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, efektifitas merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan (penerimaan) dan presentase tingkat pencapaiannya

Tabel 5.
 Rasio Efektivitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas
2017	2.067.907.851.793,77	2.076.035.321.293,00	99,61%
2018	2.101.449.302.496,83	2.176.551.072.207,00	96,55%
2019	2.182.770.952.455,51	2.288.761.562.831,00	95,37%

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan (2017-2019)

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2017-2019 dikategorikan kurang efektif. Hal ini terindikasi dari nilai rasio efektivitas yang masih di bawah 100%, yang menandakan bahwa realisasi pendapatan yang diharapkan sebagai penerimaan Kabupaten Pekalongan di bawah nilai anggaran pendapatan yang ditetapkan. Berdasarkan data anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan belanja daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2017-2019 yang berhasil dihimpun dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), tidak tercapainya realisasi pendapatan dikarenakan oleh beberapa pos yang tidak

terpenuhi. Tahun 2018, pos yang tidak terpenuhi terbesar ada pada pendapatan transfer, dimana pendapatan transfer yang dianggarkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.754.379.677.161,00, tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 1.740.112.746.919,00. Sementara itu, untuk periode 2018 dan 2019 pos yang tidak terpenuhi salah satunya pada pendapatan asli daerah (PAD). Di tahun 2018, pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 369.095.235.409,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 311.288.143.681,00. Di tahun 2019, pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 408.032.305.251,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 341.344.415.574,00.

Namun demikian, jika ditilik dari besarnya presentase rasio efektivitas di Kabupaten Pekalongan periode 2017-2019 yang angkanya sudah berada pada kisaran di atas 90%, maka dikatakan secara keseluruhan selama periode 2017-2019 Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dikatakan efektif. Hal ini mengacu dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Cicilia, dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki nilai rasio efektivitas di atas 90% dikatakan efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-2019 dikategorikan ekonomis karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Dilihat dari sisi efisiensi, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2017 dikatakan cukup efisien, sementara itu pada periode 2018 dan 2019 kinerja belum efisien karena rasionya di atas 100%. Selanjutnya, dilihat dari sisi efektivitas, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-2019 cenderung belum maksimal tetapi sudah cukup efektif dengan angka rasio setiap tahunnya yang berada di atas angka 90%. Secara keseluruhan, jika dinilai menggunakan konsep *value for money*, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selama periode 2017-2019 cukup baik.

REFERENCES

- [1] Andriani, S. (2012). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 3(1).
- [2] Arief, F. R., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2017). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit. *Jurnal Ekonomi*, 25(2), 1.
- [3] Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- [4] Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- [5] Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10.
- [6] Khikmah, Alayyal. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3, no. 1.
- [7] Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- [8] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- [9] Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Purwiyanti, Dwi. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis* 5, no. 3
- [11] Putra, A. P. A., & Wirawati, N. G. P. (2015). Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), 252-268.
- [12] Sari CF, Nindy. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi UNESA* 3, no. 1.